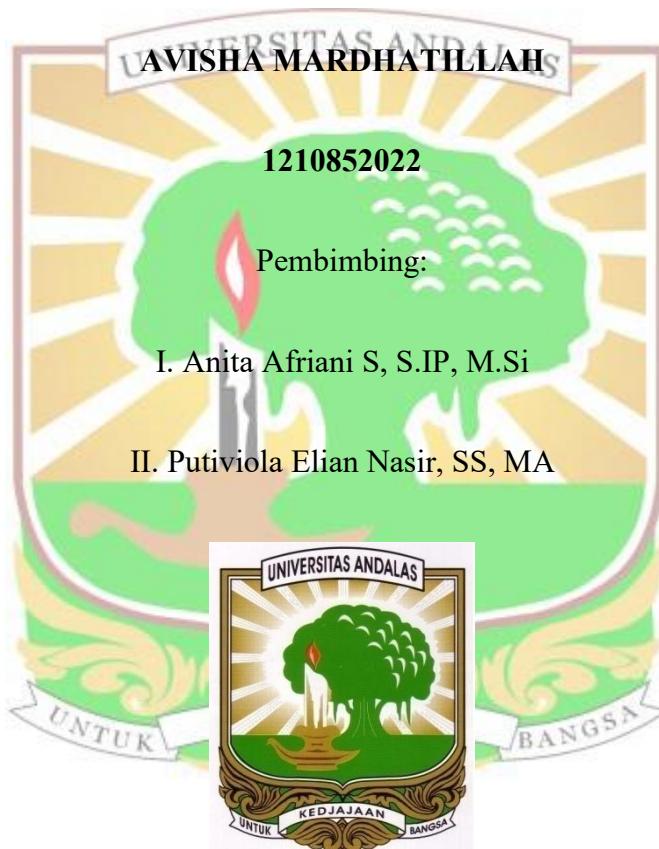


UPAYA EUROPEAN UNION RULE OF LAW MISSION IN KOSOVO (EULEX)

KOSOVO DALAM PEMANTAUAN SISTEM HUKUM DI KOSOVO

Skripsi

*Skripsi ini diajukan guna memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Andalas*



JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

PADANG

2017

Abstrak

Kemerdekaan Kosovo atas Serbia pada tahun 2008 tidak lepas dari perhatian pihak internasional. Sebagai negara yang baru merdeka, saat itu Kosovo belum memiliki supremasi hukum yang kuat. Uni Eropa membuat *European Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX) untuk membantu memantau pembentukan dan perkembangan lembaga aturan hukum di Kosovo. EULEX bertugas dalam manajemen krisis sipil dari kebijakan keamanan bersama Uni Eropa (CSDP). Upaya yang dilakukan EULEX tersebut akan peneliti deskripsikan menggunakan panduan dari Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), panduan ini terdiri dari 12 poin. Dari 12 poin yang ada, EULEX hampir melakukan seluruh poin sehingga misi EULEX dapat dikatakan berjalan sukses. Misi pemantauan EULEX terhadap lembaga aturan hukum yang ada di Kosovo terus berinovasi, pada tahun 2012 EULEX dan Pemerintahan Kosovo menyetujui sebuah *Action Compact* yang menjadi titik tolak meningkatnya perkembangan lembaga aturan hukum Kosovo. Dua tahun setelah penandatanganan *Action Compact*, EULEX telah melepaskan jabatannya di lembaga aturan hukum Kosovo. Sejak tahun 2014 Kosovo telah mengendalikan lembaga aturan hukumnya secara mandiri.

Kata kunci: Kosovo, EULEX, pemantauan sistem hukum, CSDP, manajemen krisis Sipil.



Abstract

Kosovo's independence on Serbia in 2008 with contribution of international parties. As a newly independent country, Kosovo has not had a strong rule of law. The European Union makes the European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX) to monitoring the establishment and development of rule of law institutions in Kosovo. EULEX is part of civilian crisis management of common EU security policy (CSDP). EULEX efforts will be describe using the guidelines of the Officer of the High Commissioner for Human Rights (OHCR), this guide consists of 12 points. From 12 points, EULEX almost do the whole point that the EULEX mission can be said to be a success. Monitoring mission EULEX to institute the rule of law in Kosovo continues to innovate, in 2012 EULEX and the Kosovo Government approved an Action Compact which became the starting point increase in the development of rule of law institutions of Kosovo. Two years after the signing of the Action Compact, EULEX has resigned his post in Kosovo's rule of law institutions. Since 2014 Kosovo has controlled independently his rule of law institutes.

Keywords: Kosovo, EULEX, monitoring of the law system, CSDP, civilian crisis management.

